

Pengaruh Prinsip GCG, Mekanisme GCG, Struktur GCG terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah)

Salma Sabika¹, Dyarini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: salmah99sabika@gmail.com¹, dyarini@umj.ac.id²

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 16 April 2026

Accepted: 23 April 2026

Keywords: *good corporate governance, akuntabilitas laporan keuangan, perbankan syariah*

Abstract: *Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia menuntut penerapan tata kelola yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh prinsip Good Corporate Governance (GCG), mekanisme GCG, dan struktur GCG terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah telah menerapkan berbagai prinsip dan mekanisme GCG, tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masih belum sepenuhnya teratasi, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 96 responden dari delapan Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS versi 28, meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Variabel yang diuji meliputi prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran), mekanisme GCG (struktur organisasi, audit, pelaporan), dan struktur GCG (dewan komisaris, komite audit) terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur GCG perbankan syariah, panduan praktis bagi manajemen dalam memperkuat tata kelola, serta mendorong harmonisasi kebijakan GCG dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat yang dialami perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena penting dalam perkembangan industri keuangan nasional. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK Januari 2025, saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari jumlah lembaga, tetapi juga dari peningkatan aset yang signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset bank syariah meningkat dari Rp 693,80 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 980,30 triliun per Desember 2024, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Dalam menghadapi kompleksitas globalisasi, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi aspek krusial bagi lembaga keuangan syariah (Ananta *et al.*, 2024). Kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran penting Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Lembaga keuangan syariah wajib mematuhi PSAK 401 dalam menyusun laporan keuangan agar informasi keuangan, kinerja, dan perubahan entitas akurat, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Keselarasan perkembangan informasi keuangan dengan prinsip syariah, khususnya dalam perbankan syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara signifikan (Aprilia *et al.*, 2024).

Konsep akuntabilitas laporan keuangan mengimplikasikan bahwa setiap pencatatan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap, karena catatan tersebut berperan sebagai jejak rekam transaksi dan langkah antisipasi terhadap praktik kecurangan. Informasi keuangan yang objektif dan akuntabel adalah informasi yang dapat dipercaya, sehingga penyajiannya wajib didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan kuat (Rahmatilla *et al.*, 2024). Akuntabilitas berperan penting dalam laporan keuangan dan merupakan ciri penting untuk kejelasan dan kemudahan pemahaman informasi bagi pengguna (Purwanto *et al.*, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek teknis pelaporan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab kepada seluruh stakeholders.

Namun dalam praktiknya, akuntabilitas di perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan di kalangan stakeholders. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus kecurangan dan penyalahgunaan dana nasabah oleh pimpinan cabang Bank Mega Syariah, serta pembobolan dana nasabah mencapai miliaran rupiah oleh karyawan Bank NTB Syariah (Putriana *et al.*, 2024). Kasus-kasus ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, implementasi tata kelola yang baik masih belum optimal.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajemen) dapat menimbulkan agency problem (Hassan *et al.*, 2022). Dalam konteks perbankan syariah, masalah keagenan muncul ketika manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik dan stakeholders lainnya. *Agency theory* dalam konteks Islam menambahkan dimensi spiritual dan etis, di mana agen tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam perbankan syariah mencakup aspek duniawi dan

ukhrawi (Kismawadi, 2025).

Untuk mengatasi *agency problem* dan meminimalisir *agency cost*, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang mencakup prinsip, mekanisme, dan struktur *GCG*. Prinsip-prinsip *GCG* seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan (Hassan *et al.*, 2022). Dalam perbankan syariah, sistem tata kelola *GCG* mengutamakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran (Khairina *et al.*, 2023). Akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, sebagaimana ditegaskan oleh (Ali & Saputra, 2023) bahwa akuntabilitas secara signifikan memengaruhi kualitas tata kelola perusahaan yang baik, bersama dengan transparansi dan tanggung jawab.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya (Sari, 2021)). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *GCG* memiliki dampak penting pada kinerja finansial dan nilai perusahaan. Dalam perbankan syariah, mekanisme seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite audit, dan dual board governance berfungsi sebagai pengendali perilaku agen agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan stakeholder (Kismawadi, 2025)). Komite Audit mengawasi risiko, mengendalikan proses, serta mengawasi audit internal dan eksternal (Amelinda *et al.*, 2021), dan Audit Eksternal memastikan akurasi dan reliabilitas laporan keuangan bank syariah (Ghoriyuudin., *et al.*, 2024).

Struktur *Corporate Governance* menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan tujuan sosial maupun tujuan individu dengan tujuan masyarakat. Struktur *Corporate Governance* memiliki peran dalam mengawasi serta mengendalikan keputusan manajemen dan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan termasuk masyarakat sekitar (Pattisahusiwa *et al.*, 2017). Struktur *GCG* melibatkan beberapa mekanisme pengawasan internal, seperti Dewan Komisaris dalam mengawasi perilaku manajemen dan menjembatani kepentingan principal (Mayliza & Yusnelly, 2021). Pengurusan perusahaan menjadi kewajiban bersama bagi seluruh anggota Dewan Direksi. Bank yang memiliki struktur tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, cenderung menunjukkan performa keuangan yang lebih baik, sebagaimana terlihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang mencatat peningkatan laba yang konsisten seiring dengan penerapan prinsip-prinsip *GCG* ((Habibi *et al.*, 2024).

Meskipun perbankan syariah telah menerapkan berbagai prinsip dan mekanisme *GCG*, tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masih belum sepenuhnya teratasi. Implementasi *GCG* belum optimal, kurangnya kesadaran manajemen dan pemegang saham, serta keterbatasan regulasi menjadi kendala utama (Pakpahan *et al.*, 2024). Permasalahan struktural, seperti ketidakjelasan wewenang yang diizinkan, batasan waktu, dan koordinasi yang buruk, menghambat pengawasan. Guna memastikan penerapan *GCG* yang efektif, organisasi memerlukan struktur yang jelas yang memisahkan tanggung jawab manajemen dan pengawasan. Sayangnya, hingga saat ini implementasi *GCG* di Indonesia masih terhambat oleh komitmen yang belum kuat, ditambah kendala internal seperti kapasitas sumber daya manusia dan eksternal seperti dinamika regulasi.

Penelitian menunjukkan bahwa jika gagal dalam menerapkan dan mengaplikasikan prinsip syariah maka dapat menyebabkan 85% nasabah pindah ke bank lainnya, yang menekankan pentingnya kepercayaan dalam perkembangan lembaga keuangan (Tilawati., 2023). Di balik pertumbuhan aset yang pesat, masih terdapat tantangan fundamental yang berkaitan dengan

penerapan *GCG* secara menyeluruh. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip *GCG*, lemahnya pengawasan internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Amelinda & Rachmawati, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh *GCG* terhadap berbagai aspek kinerja perbankan syariah. Penelitian (Linuwih & Parasetya, 2024) menemukan bahwa *GCG* mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Menurut (Pirdaus *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa secara simultan, variabel prinsip *GCG* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMD. (Wardani & Susilowati, 2020) menyatakan bahwa prinsip *GCG* secara signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Dalam konteks mekanisme *GCG*, (Wahyudi & Rosyidah, 2024) menemukan bahwa mekanisme *GCG* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. (Azzahra & Nugroho, 2025) menunjukkan bahwa mekanisme *GCG* seperti kepemilikan institusional dan komisaris independen berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

Dari sisi struktur *GCG*, (Mayliza & Yusnelly, 2021) membuktikan pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. (Yusifa *et al.*, 2023) menunjukkan adanya hubungan antara perbankan syariah dan tata kelola syariah di Indonesia. (Srimaya & Amalia, 2023) menyimpulkan bahwa struktur tata kelola yang baik diperlukan untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan melalui transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan tanggung jawab. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa *GCG* memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah.

Namun demikian, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, penelitian tentang *GCG* masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian mengkaji *GCG* secara umum tanpa fokus pada elemen-elemen spesifik yang bervariasi dalam praktik tata kelola perusahaan. Kedua, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu masih didominasi oleh kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan, sehingga belum banyak yang secara khusus menguji pengaruh *GCG* terhadap akuntabilitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Ketiga, penelitian terdahulu cenderung menggunakan data sekunder, sementara penggunaan data primer melalui persepsi stakeholder internal dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai implementasi *GCG*.

Penelitian ini memiliki keunikan karena tidak hanya membahas pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan, tetapi juga mengkaji lebih luas dan lebih dalam mengenai sistem *GCG* secara komprehensif yang terdiri dari prinsip, mekanisme, dan struktur *Good Corporate Governance* itu sendiri. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana sistem tata kelola yang diterapkan secara menyeluruh dapat memengaruhi kualitas pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan. Fokus pada ketiga dimensi *GCG* (prinsip, mekanisme, dan struktur) memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap cara kerja *Good Corporate Governance* dalam praktik perbankan syariah, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi penguatan tata kelola dan transparansi di sektor perbankan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip *Good Corporate Governance*, mekanisme *GCG*, dan struktur *GCG* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur *GCG* perbankan syariah, memberikan panduan praktis bagi manajemen dalam memperkuat tata kelola, serta mendorong harmonisasi kebijakan *GCG* dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik

terhadap sistem keuangan syariah.

LANDASAN TEORI

Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, merupakan pedoman penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan GCG tidak hanya berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga sebagai panduan perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang memengaruhi operasional perbankan sehari-hari (Khairina & Inayah, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa GCG yang efektif mampu meningkatkan kinerja keuangan, memberikan manfaat bagi karyawan dan organisasi, serta membantu pencapaian tujuan bank (Ningsih *et al.*, 2024). Selain itu, penerapan GCG di bank melibatkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, pengembangan profesional, dan pendidikan, dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan kepatuhan operasional bank terhadap prinsip-prinsip tersebut melalui bimbingan, nasihat, serta pengawasan kebijakan (Rustiana, 2022).

Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) adalah aturan, prosedur, dan hubungan yang mengatur peran serta tugas organ perusahaan agar operasional berjalan sesuai tujuan (Sari, 2021). Mekanisme ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal mencakup ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, serta kontrak insentif jangka panjang untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Sedangkan mekanisme eksternal meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan pengendalian oleh pasar, di mana perilaku manajemen yang tidak sehat akan tercermin dalam penurunan nilai saham (Sari, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan GCG di Bank Umum Syariah masih belum optimal meskipun regulasi sudah ada. Indonesia bahkan tertinggal dibanding negara Asia lain karena adanya masalah seperti kepemilikan saham dan jabatan rangkap yang melanggar prinsip GCG (Sharah *et al.*, 2019; Azizah, 2023). Namun, penelitian menunjukkan bahwa kualitas GCG di Bank Umum Syariah telah memenuhi 90% indikator Indeks GCG, meski efektivitasnya belum maksimal karena belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah (Rahdian *et al.*, 2023). Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai penasihat strategis untuk memastikan keputusan manajemen selaras dengan prinsip Islam (Rahdian *et al.*, 2023).

Struktur *Good Corporate Governance*

Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah dirancang berbeda dari bank konvensional karena berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah wajib memiliki departemen khusus seperti *Shari'a Risk Control*, *Internal Shari'a Reviewer*, audit syariah, dan unit kepatuhan syariah untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai syariah (Srimaya & Amalia, 2023). Struktur ini menekankan akuntabilitas dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus penasihat strategis agar keputusan manajemen selaras dengan prinsip Islam (Yusifa *et al.*, 2023).

Meski regulasi seperti PBI No. 11/33/PBI/2009 telah mengatur penerapan GCG, masih terdapat kelemahan dalam kualitas DPS, perencanaan administrasi, dan evaluasi operasional syariah (Azizah, 2023). Namun, penelitian menunjukkan bahwa bank dengan struktur tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel cenderung memiliki kinerja keuangan lebih baik, seperti BRIS

dan BSI yang mencatat peningkatan laba konsisten berkat penerapan *GCG* (Habibi *et al.*, 2024). Dengan struktur yang solid, bank syariah dapat memastikan kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Yusifa *et al.*, 2023).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Selama proses penelitian, pengumpulan data dan informasi merupakan unsur esensial yang memerlukan pendekatan sistematis dan kepatuhan terhadap standar tertentu agar hasil studi dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Kualitas dan keakuratan kesimpulan sangat bergantung pada keandalan sumber data yang digunakan. Dalam studi ini, data awal dikumpulkan melalui survei langsung kepada Kepala Kantor, Kepala Divisi, dan Staff yang bekerja di Perbankan Syariah. Informasi diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada berbagai tingkat jabatan, mulai dari kepala kantor, kepala divisi, dan staff. Periode pengumpulan data berlangsung dari akhir Oktober 2025 hingga selesainya studi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank Umum Syariah, meliputi kepala kantor, kepala divisi, dan staf. Populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu memahami penerapan prinsip, mekanisme, dan struktur Good Corporate Governance terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian tidak menggunakan sensus, melainkan mengambil sampel dengan teknik *non-probability* sampling melalui metode *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti menentukan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan.

Adapun kriteria pengambilan sampel mencakup:

1. Bank syariah yang aktif beroperasi selama periode 2020–2024.
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif.
3. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan GCG secara konsisten.
4. Kantor cabang Bank Umum Syariah yang mudah diakses.
5. Tidak ada pembatasan responden terkait jabatan di kantor cabang.

Adapun sampel yang akan diambil akan menggunakan rumus Lemeshow (1997) sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 \cdot P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel minimal yang diperlukan
 z : nilai z sesuai tingkat kepercayaan (95% = 1,96)
 P : maksimal estimation (0,5 = 50%)
 d : kesalahan (absolut) yang dapat ditolelir 10% (0,1)

Melalui rumus tersebut, penelitian akan menentukan jumlah sampel dengan data di bawah ini:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot (0,5)(1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot (0,25)}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 96$$

Setelah menghitung jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 96 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner penelitian kepada karyawan Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian. Kuesioner tersebut dirancang untuk menggali informasi terkait penerapan prinsip, mekanisme, dan struktur *Good Corporate Governance* (GCG) serta hubungannya dengan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil penelitian mencerminkan persepsi dan pengalaman langsung dari para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validasi

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Prinsip *Good Corporate Governance* (X1), Mekanisme *Good Corporate Governance* (X2), Struktur *Good Corporate Governance* (X3), serta Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) dinyatakan valid, karena nilai *r*-hitung masing-masing item lebih besar daripada *r*-tabel (0,2006). Hal ini berarti instrumen kuesioner yang digunakan mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat dan konsisten. Dengan demikian, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini layak dijadikan acuan untuk tahap analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang dapat diterima. Variabel Prinsip *Good Corporate Governance* (X1) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,878, Mekanisme *Good Corporate Governance* (X2) sebesar 0,639, Struktur *Good Corporate Governance* (X3) sebesar 0,874, dan Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,689. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari batas minimum 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel secara konsisten dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Untuk jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha
Prinsip GCG	.878
Mekanisme GCG	.639
Struktur GCG	.874
Akuntabilitas Laporan Keuangan	.689

Uji Multikolinearitas

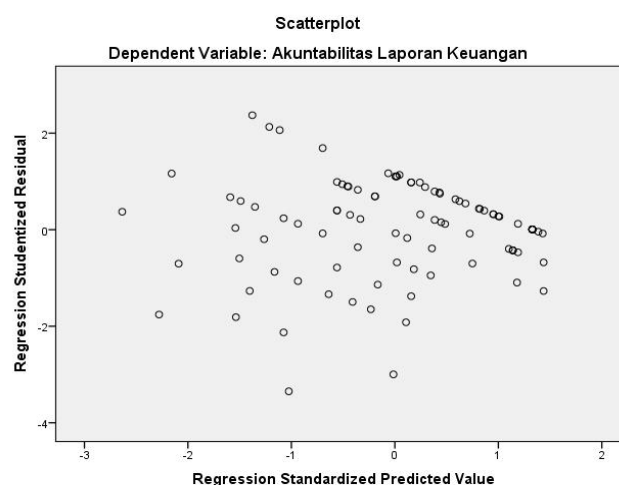
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang kurang dari 10 pada setiap variabel, yaitu Prinsip *Good Corporate Governance*, Mekanisme *Good Corporate Governance*, dan Struktur *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya data, bisa dilihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics			
No.	Variabel	Tolerance	VIF
1	Prinsip <i>GCG</i> (X1)	.902	1.109
	Mekanisme <i>GCG</i> (X2)	.902	1.109
	Struktur <i>GCG</i> (X3)	.920	1.086

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari grafik scatter plot yang memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, varians residual antar pengamatan bersifat konstan sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Pengaruh Prinsip GCG, Mekanisme GCG, Struktur GCG terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah)

Tabel 3. Uji Hasil Estimasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,200	3,571		4,256	,000
	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	,266	,034	,664	7,888	,000
	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	-,071	,105	-,057	-,671	,504
	Struktur Goode <i>Corporate Governance</i>	-,083	,106	-,065	-,782	,436

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa variabel Prinsip *Good Corporate Governance* (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 7,888 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y). Sementara itu, variabel Mekanisme *Good Corporate Governance* (X2) menunjukkan nilai t-hitung -0,671 dengan

signifikansi $0,504 > 0,05$, dan variabel Struktur *Good Corporate Governance* (X3) memiliki nilai t-hitung $-0,782$ dengan signifikansi $0,436 > 0,05$. Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Artinya, dari ketiga variabel independen yang diuji, hanya prinsip *GCG* yang terbukti berpengaruh signifikan, sedangkan mekanisme dan struktur *GCG* tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Uji Parsial (uji t)

Tabel 4. Uji Parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,200	3,571		4,256	,000
	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	,266	,034	,664	7,888	,000
	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	-,071	,105	-,057	-,671	,504
	Struktur Goode <i>Corporate Governance</i>	-,083	,106	-,065	-,782	,436

Uji Simultan F

Tabel 5. Uji Simultan F

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	189.091	3	63.030	21.426	0.000
Residual	270.649	92	2.942	—	—
Total	459.740	95	—	—	—

Tabel 5 hasil analisis pengaruh Prinsip *GCG*, Mekanisme *GCG*, Struktur *GCG* terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN

1. Variabel *Prinsip Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,266. Artinya, setiap peningkatan skor pada variabel *Prinsip GCG* sebesar 1 akan meningkatkan *Akuntabilitas Laporan Keuangan* sebesar 0,266. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip *GCG*, maka akuntabilitas laporan keuangan juga semakin meningkat.
2. Variabel *Mekanisme Good Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,071. Artinya, setiap peningkatan skor pada variabel *Mekanisme GCG* justru menurunkan *Akuntabilitas Laporan Keuangan* sebesar -0,071. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa mekanisme *GCG* yang baik seharusnya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.
3. Variabel *Struktur Good Corporate Governance* juga berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,083. Artinya, setiap peningkatan skor pada variabel Struktur *GCG* justru menurunkan *Akuntabilitas Laporan Keuangan* sebesar -0,083. Hal ini menunjukkan bahwa struktur *GCG* yang ada belum mampu mendukung peningkatan akuntabilitas laporan keuangan secara optimal.

4. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan adalah Prinsip *Good Corporate Governance*, dengan nilai koefisien regresi positif terbesar yaitu 0,266 dan nilai *Standardized Coefficients Beta* tertinggi. Artinya, jika penerapan prinsip GCG meningkat, maka akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil peneliti dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Menambahkan teknik pengumpulan data tambahan selain menggunakan data dari kuesioner, yakni dengan menambahkan metode seperti wawancara atau yang lainnya untuk meneliti mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan oleh Bank Umum Syariah.
2. Dapat mengganti atau menambahkan variabel lain yang dari penelitian ini dan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
3. Memastikan tempat dan waktu objek penelitian agar lebih efisien dalam menyebarkan kuesioner, dan data yang didapatkan akan lebih relevan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap good corporate governance. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 87–98. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2>
- Amelinda, T., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 45–58.
- Aprilia, H., & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JMA)*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.62281/jma.v2i1>
- Azzahra, H., & Nugroho, H. (2025). Determinasi kinerja perbankan syariah di Indonesia: Peran moderasi good corporate governance. *Borobudur Accounting Review*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.31603/bacr.13734>
- Habibi, R., Santoso, M., & Nasirin, M. (2024). Peran maqashid syariah dan good corporate governance terhadap pertumbuhan laba bank syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 66–78.
- Hassan, A., Sohail, M. S., & Munshi, M. M. R. (2022). Shari'ah governance and agency dynamics of Islamic banking operations in the Kingdom of Saudi Arabia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 89–106. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0252>
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi good corporate governance pada bank syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466>
- Kismawadi, E. R. (2025). Improving Islamic bank performance through agency cost and dual board governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(3), 461–483. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0035>
- Linuwih, D., & Parasetya, M. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 1–15.
- Mayliza, R., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap Islamic social responsibility pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 101–112.
- Ningsih, N., Nurkaifatunnisa, Bella, J., & Wahid, S. (2024). Analisis peran good corporate

- governance dalam perbankan syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 55–66.
- Pakpahan, D., Sihombing, N., & Sangadah, N. (2024). Penerapan prinsip good corporate governance dalam hukum perusahaan: Mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi di perusahaan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 6(2), 120–134.
- Pirdaus, P., Aristi, M. D., & Ahyaruddin, M. (2025). Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan badan usaha milik daerah Provinsi Riau. *Review Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 210–223. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2>
- Putriana, A., Abdillah, M. R., Anjaswari, G., & Fitriyani, Y. (2024). Islamic corporate governance dan kecurangan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia: Analisis konten. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 8(1), 33–47.
- Rahdian, A., Mardian, S., & Razikun, M. (2023). The measurement of good corporate governance in Islamic banking and its effect on financial performance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.530>
- Rahmatilla, F., & Ali, A. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan perspektif akuntansi syariah. *Mazinda: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 22–35.
- Sari, I. (2021). Penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *JURIPOL: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 77–89.
- Srimaya, L., & Amalia, E. (2023). Penerapan tata kelola Islam dalam perbankan syariah di Indonesia: Sebuah studi kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 199–206. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip dasar akuntansi syariah: Landasan integritas dan transparansi dalam keuangan berbasis nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 3110–3120.
- Wardani, D., & Susilowati, W. (2020). Pengaruh agency cost terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1–12.
- Yusifa, E., Permatasari, F., & Sujianto, A. (2023). Pengaplikasian tata kelola keuangan Islam dalam perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 124–134.